

	<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b> <b>PROGRAM STUDI: HUKUM</b> <b>FAKULTAS HUMANIORA</b> <b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> <b>TAHUN AKADEMIK 2019/2020</b>			
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>BOBOT SKS</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>TANGGAL PENYUSUNAN</b>
<b>HUKUM TATA NEGARA</b>	HKU03	3	II	20 Februari 2020
<b>OTORITAS</b>	<b>PENGEMBANG RPS</b>		<b>KA PRODI</b>	
	 Muhammad Mahendra Abdi, SH., MH NIK. 1166032018123		 Fakhruddin Razy, SH., MH NIK. 1166012011041	
<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)</b>  <b>Catatan:</b>  <b>(S): Sikap,</b>  <b>(KU): Keterampilan Umum,</b>  <b>(KK): Keterampilan</b>	<b>CPL Program Studi</b>			
	S1	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki Nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;		
	S2	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;		
	KU2	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.		

<b>Khusus, (P): Pengetahuan</b>	KU3	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
	KK1	mampu melaksanakan Praktek Hukum Acara dalam kehidupan sehari-hari;
	KK2	mampu membuat Surat Kuasa dalam suatu perkara persidangan;
	KK3	Mampu melakukan pendaftaran surat kuasa dalam suatu perkara di persidangan;
	KK4	Mampu melaksanakan prosedur pengajuan banding, kasasi, peninjauan kembali;
	KK5	Mampu bersidang dalam penyelesaian sengketa konstitusional kewenangan lembaga negara;
	P1	Menguasai konsep teoritis praktik beracara, prinsip dan konsep umum surat gugatan, pendampingan dlm persidangan, sosial budaya, konsep dasar hukum, ilmu komunikasi dan etika profesi;
	P2	Menguasai konsep etika dan hukum perundang-undangan sesuai dengan kewenangan profesi hukum serta mengamalkan nilai-nilai agama disetiap layanan pendampingan yang berazaskan pancasila;
	<b>CP Mata Kuliah</b>	
	M1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup HTN
	M2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sumber-sumber HTN
	M3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas-asas HTN
	M4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah ketatanegaraan Indonesia
	M5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga Megara menurut UUD 1945
	M6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga-lembaga independen
M7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan demokrasi Indonesia	
M8	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Asas-Asa Pemerintahan Daerah	

	M9	Mahasiswa mampu dan memahami dan menjelaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
<b>Deskripsi Singkat Mata Kuliah</b>	Mata kuliah Hukum Tata Negara dirancang untuk memberikan teori ilmu hukum ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	
<b>Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan</b>	1	Pendahuluan : A. lingkup kajian HTN. B, Pengertian HTN dan Hubungannya dengan HAN. C, Hubungan HTN dengan Ilmu Negara dan Ilmu Politik
	2	Sumber-sumber Hukum Tata Negara: A. pengertian sumber hukum, B. macam-macam sumber hukum, C. sumber hukum tata negara, D. Hierarki Peraturan Perundang-undangan RI, E. hierarki menurut UU no 10 Tahun 2004. F. hierarki menurut UU No 12 Tahun 2011.
	3	Asas-asas Hukum Tata Negara: A. Pengertian Asas-Asas HTN, B. asas-asas HTN. 1. Asas Pancasila, 2. Asas Negara Hukum, 3. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, 4. Asas negara kesatuan, 5. Asas pemisahan kekuasaan dan <i>check and balances</i>
	4	Sejarah Ketatanegaraan Indonesia: A. Perubahan Sistem pemerintahan Negara, B. Perkembangan Konstitusi di Indonesia, C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, D. Reformasi dan Perubahan UUD 1945
	5	Lembaga-lembaga Negara: A. Perkembangan Ketatanegaraan, B. Lembaga-Lembaga Negara 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2. Dewan Perwakilan rakyat, 3. Dewan Perwakilan Daerah, 4. Presiden dan Wakil Presiden, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. Badan Pemeriksa Keuangan, 8. Komisi Yudisial.
	6	Lembaga-Lembaga Independen: A. perkembangan lembaga-lembaga independen, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Komisi Nasional HAM, D. Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara,
	7	Demokrasi di Indonesia: A. Konsepsi Demokrasi, B. Sistem dan Praktik Demokrasi di Indonesia. C. Sistem dan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia
	8	Asas-Asas Pemerintahan Daerah: A. Asas Desentralisasi, B. Asas Dekonsentrasi, C. Asas Tugas Pembantuan

	9	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: A. Dasar, Kedudukan Dan Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, B.Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. C. Praktek Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia D. Kriteria Kegentingan yang Memaksa	
<b>Penilaian</b>	70% Ujian 30% tugas dan evaluasi		
<b>Pustaka</b>	Utama	1. Huda, Ni'Matul, Hukum Tata Negara (edisi revisi), 2005	
	Pendukung	1. Asshiddiqie, Jimly, Prof.DR., HukumTata Negara Pasca Reformasi, Bhuanallmu Populer. 2. Mahfud, MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi). 2001	
<b>Media Pembelajaran</b>	Software/Perangkat Lunak		Hardware/Perangkat Keras
	Power Point		Laptop, Lcd/proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
<b>Team Teaching</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muhammad Mahendra Abdi, SH., MH (MA)</li> <li>- Fakhruddin Razy, SH., MH (FR)</li> <li>- Yandi Saputera, SH., MH (YS)</li> </ul>		
<b>Mata Kuliah Syarat</b>	-		

**Tabel Rincian Pembelajaran**

Minggu Ke	Kemampuan akhir yg diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator	Kriteria dan bentuk penilaian	Bobot Penilaian	Dosen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup HTN	Ruang lingkup HTN, Pendahuluan : A. lingkup kajian HTN. B. Pengertian HTN dan Hubungannya dengan HAN. C. Hubungan HTN dengan Ilmu Negara dan Ilmu Politik	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 1x(3x5 0')  BM 2 x 60 menit	Mahasiswa mempelajari materi tentang ruang lingkup HTN melalui e-learning atau diskusi pada chat WA grup	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	5%	MA
2-3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sumber-sumber HTN	Sumber-sumber Hukum Tata Negara: A. Pengertian sumber hukum, B. Macam-macam sumber hukum, C. Sumber hukum tata negara, D. Hierarki Peraturan Perundang-undangan RI, E. Hierarki menurut UU no 10 Tahun 2004.	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 1x(3x5 0')  BM 2 x 60 menit	Mahasiswa mempelajari tentang hasil sumber-sumber HTN melalui e-learning/ diskusi pada chat WA grup/ dengan menggunakan zoom	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman Istilah yang berkaitan sumber-sumber HTN	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	10%	MA

		F. Hierarki menurut UU No 12 Tahun 2011.							
4-5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas-asas HTN	Asas-asas Hukum Tata Negara: A. Pengertian Asas-Asas HTN, B. Asas-asas HTN. a) Asas Pancasila, b) Asas Negara Hukum, c) Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, d) Asas negara kesatuan, e) Asas pemisahan kekuasaan dan <i>check and balances</i>		(TM: 1x(3x5 0')  BM 2 x 60 menit	Mahasiswa mempelajari tentang asas-asas HTN melalui e-learning/ diskusi pada chat WA grup/ menggunakan zoom	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman tentang Pemahaman tentang asas-asas HTN	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Ketepatan menjelaskan dan penguasaan materi Bentuk penilaian : • Presentasi • Diskusi	10%	MA
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah ketatanegaraan Indonesia	Sejarah Ketatanegaraan Indonesia: A. Perubahan Sistem pemerintahan Negara, B. Perkembangan Konstitusi di Indonesia, C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, D. Reformasi dan Perubahan UUD 1945	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 1x(3x5 0')  BM 2 x 60 menit	Mahasiswa mempelajari tentang sejarah Ketatanegaraan Indonesia melalui e-learning/ diskusi pada chat grup WA/ menggunakan Zoom	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman tentang istilah sejarah ketatanegaraan Indonesia.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	5%	FR

7-8	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga Negara menurut UUD 1945	Lembaga-lembaga Negara: A. Perkembangan Ketatanegaraan, B. Lembaga-Lembaga Negara: a) Majelis Permusyawaratan Rakyat, b) Dewan Perwakilan rakyat, c) Dewan Perwakilan Daerah, d) Presiden dan Wakil Presiden, e) Mahkamah Agung, f) Mahkamah Konstitusi, g) Badan Pemeriksa Keuangan, h) Komisi Yudisial.	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 1x(3x50')  BM 2 x 60 menit	Mahasiswa mempelajari tentang lembaga negara menurut UUD 1945 melalui e-learning/ diskusi pada chat grup WA/ menggunakan zoom	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman tentang lembaga negara menurut UUD 1945	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	10%	FR
-----	--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--	-----	----

9-10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga-lembaga independen	Lembaga-Lembaga Independen: A. Perkembangan lembaga-lembaga independen, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Komisi Nasional HAM, D. Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara,	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 1x(3x50')  BM 2 x 60 menit	Mahasiswa mempelajari tentang lembaga-lembaga independen melalui e-learning / diskusi pada chat grup WA dan/ menggunakan zoom	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman tentang lembaga independen	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	15%	FR
11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan demokrasi Indonesia	Demokrasi di Indonesia: A. Konsepsi Demokrasi, B. Sistem dan Praktik Demokrasi di Indonesia. C. Sistem dan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 1x (3x50')  BM 2 x 60 menit	Tugas : melakukan diskusi dan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia melalui e-learning / diskusi pada chat grup WA dan/ menggunakan zoom	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman tentang Demokrasi Indonesia	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	15%	YS
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Asas-Asas Pemerintahan Daerah	Asas-Asas Pemerintahan Daerah: A. Asas Desentralisasi, B. Asas Dekonsentrasi,	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 1x (3x50')  BM 2 x 60	Mahasiswa mempelajari tentang Asas-Asas Pemerintahan	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman tentang Asas-asas	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-	10%	YS

		C. Asas Tugas Pembantuan		menit	Daerah melalui e-learning / diskusi pada chat grup WA dan/ menggunakan zoom	pemerintahan daerah	test: • Diskusi		
13-14	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan urgensi Perpu dalam HTN	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: A. Dasar, Kedudukan Dan Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, B. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. C. Praktek Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia D. Kriteria Kegentingan yang Memaksa	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi PBL	(TM: 1x (3x50')  BM 2 x 60 menit	Mahasiswa mempelajari tentang urgensi perpu dalam HTN melalui e-learning / diskusi pada chat grup WA dan/ menggunakan zoom  Tugas :melakukan diskusidan membuat opini mengenai Per no pu1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem	Ketepatan menjelaskan dan Pemahaman tentang Perpu dalam urgensi HTN	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan Opini • Presentasi • Diskusi	20%	YS

					keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa

Membuat Analisa Kebijakan-Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam Ketatanegaraan dalam situasi Pandemi covid19 yang melanda Indonesia saat ini

# Contoh

	<p style="text-align: center;"><b>PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS SARI MULIA</b></p>		
<b>RENCANA TUGAS MAHASISWA</b>			
<b>MATA KULIAH</b>	HUKUM TATA NEGARA		
<b>KODE MK</b>	HKU03	<b>SKS : 3</b>	<b>SEMESTER : II</b>
<b>DOSEN PENGAMPU</b>	Muhammad Mahendra Abdi., SH, MH (MA) Fakhruddin Razi., SH, MH (FR) Yandi Saputera., SH, MH (YS)		
<b>BENTUK TUGAS: Makalah</b>			
<b>JUDUL TUGAS</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Asas Hukum Tata Negara Dalam Koridor Ketatanegaraan Indonesia</li> <li>2. Kedudukan Lembaga Independen di Indonesia</li> <li>3. urgensi Perpu dalam HTN</li> </ol>			
<b>SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH</b>			
<b>DESKRIPSI TUGAS:</b>			
<p>Makalah terdiri atas cover, daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka/isi, kesimpulan dan daftar pustaka dijilid dan kirim ke email dosen PJ mata kuliah/ dikumpulkan dulu ke PJ kelas. Penulisan makalah menggunakan kertas ukuran A4, huruf <i>Times New Roman</i>, font 12, spasi 1,5, dan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm.</p> <p>Isi makalah paling sedikit memuat pengertian, analisis hukum, kesimpulan kelompok.</p>			
<b>METODE Pengerjaan Tugas</b>			
Dikerjakan secara mandiri			
<b>BENTUK DAN FORMAT LUARAN</b>			
<b>INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN</b>			
<b>JADWAL PELAKSANAAN</b>			
Kegiatan	:	Tanggal	
<b>LAIN-LAIN</b>			
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Huda, Ni'Matul, Hukum Tata Negara (edisi revisi), 2005</li> <li>2. Asshiddiqie, Jimly, Prof.DR., HukumTata Negara Pasca Reformasi, Bhuanallmu Populer.</li> <li>3. Mahfud, MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi). 2001</li> <li>4. Literatur yang mendukung lainnya,</li> </ol>			

# Contoh

## Rubrik Penilaian Tugas

No	Aspek Penilaian	Artikel-1		Artikel-2		Artikel-3	
	Skor	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)
1	Artikel berasal dari journal terindeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						
2	Artikel berkaitan dengan temaisu terkini kebidanan pada kehamilan						
3	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel						
4	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel						
5	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel						
6	Ketepatan meringkas hasil penelitiannya dalam artikel						
7	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel						
8	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel						
9	Ketepatan memberikan komentar pada artikel journal yang dipilih						
Jumlah skor tiap ringkasan artikel							
Rata-rata skor yang diperoleh							